SAMVADA
Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relation
http://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/JSv

ISSN : 2962-3553
Volume : 5
Nomor : 2
Edisi : Nopember 2026

Analisis Framing Pemberitaan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dalam Perspektif Etika Kepemimpinan Hindu (*Asta Brata*)

I Komang Widya Purnama Yasa[1], Edy Chandra[2], Ni Made Dhyana Astikaran[3]
[1,2,3] Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
komang.yasa1990@gmail.com[1], Edychandra332@gmail.com[2], madedhyana09@gmail.com[3]

Keywords :
Asta Brata; Framing Analysis; Impeachment Discourse; Online Media; Political Communication

Abstract

This study examines how Indonesian online news portals construct and frame the political discourse surrounding the impeachment of Vice President Gibran Rakabuming Raka through the philosophical lens of Hindu leadership ethics, Asta Brata. The urgency of this research stems from the intensifying polarization of digital political journalism, where media outlets negotiate between pragmatic institutional stability and public demands for ethical leadership accountability. Employing a constructivist paradigm and qualitative text analysis, this study applies Zhongdang Pan and Gerald M. Kosickis framing model across four prominent Indonesian online news portals detik.com, kompas.com, kumparan.com, and indopolitika.com covering syntactic, script, thematic, and rhetorical structures. The findings reveal a sharp structural and ideological divergence: detik.com and kompas.com anchor their narratives on constitutional formalism and executive stability, whereas kumparan.com and indopolitika.com foreground public ethical scrutiny, digital track records, and civil society dissent. Evaluated against the eight cosmic virtues of Asta Brata, the media discourse unveils a normative tension regarding Yama Brata (substantive versus procedural justice), Baruna Brata (statesmanship competence), Candra Brata (ethical communication), and Indra versus Bayu Brata (pragmatic welfare versus grassroots responsiveness). This research contributes to Indonesian political communication scholarship by integrating indigenous virtue ethics into contemporary digital media framing analysis, demonstrating that traditional ethical frameworks remain vital for evaluating normative biases in political journalism.

	Abstrak
Kata Kunci : *Asta Brata*; Analisis Framing; Komunikasi Politik; Media Online; Wacana Pemakzulan	Penelitian ini menganalisis bagaimana portal berita online di Indonesia mengonstruksi dan membingkai wacana politik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui perspektif etika kepemimpinan Hindu (*Asta Brata*). Urgensi penelitian ini bertolak dari menguatnya polarisasi jurnalisme politik digital, di mana institusi media menegosiasikan antara kepentingan stabilitas institusional pragmatis dengan tuntutan akuntabilitas moral pemimpin publik. Menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan analisis teks kualitatif, penelitian ini menerapkan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada empat portal berita online nasional yakni detik.com, kompas.com, kumparan.com, dan indopolitika.com yang mencakup struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Hasil penelitian menunjukkan adanya divergensi struktural dan ideologis yang tajam yang dimana detik.com dan kompas.com menambatkan narasinya pada formalisme konstitusional dan stabilitas pemerintahan, sedangkan kumparan.com dan indopolitika.com menonjolkan pengawasan etik publik, rekam jejak digital, serta desakan masyarakat sipil. Ditinjau melalui delapan nilai *Asta Brata*, diskursus media menyingkap ketegangan normatif terkait *Yama Brata* (keadilan substantif berbanding prosedural), *Baruna Brata* (keluasan wawasan kenegaraan), *Candra Brata* (kesantunan komunikasi), serta Indra versus *Bayu Brata* (stabilitas pembangunan berbanding kepekaan aspirasi rakyat). Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi politik di Indonesia dengan mengintegrasikan etika kebajikan lokal ke dalam analisis framing media digital.

PENDAHULUAN

Transformasi media massa di era digital telah menggeser pusat produksi, distribusi, dan kontestasi wacana politik ke ruang siber melalui dominasi portal berita online (*online news portals)* (Nasrullah, 2022). Karakteristik media online yang bertumpu pada kecepatan publikasi (*real-time journalism*), pembaruan berkelanjutan (*continuous updating*), serta logika ekonomi menuntut jurnalisme untuk bekerja dalam akselerasi industri yang sangat ketat (Kurniawan & Astuti, 2021). Dalam lanskap komunikasi politik Indonesia, situs berita online tidak lagi beroperasi sekadar sebagai saluran transmisi informasi yang netral, pasif, dan steril dari kepentingan, melainkan berperan sebagai aktor diskursif yang secara aktif memproduksi realitas sosial-politik bagi

khalayak luas (Nugroho & Syarif, 2022). Setiap institusi media memiliki perangkat ideologis, kebijakan redaksional, serta relasi ekonomi-politik dengan pemilik modal maupun lingkaran kekuasaan yang menentukan peristiwa mana yang layak diangkat ke permukaan dan sudut pandang mana yang harus ditekan atau disamarkan (Masduki, 2021). Akibatnya, sebuah peristiwa politik nasional yang sama dapat mengalami pembingkaian (*framing*) yang bertolak belakang ketika dikonstruksi oleh ruang redaksi dengan orientasi kepentingan yang berbeda(Pratyaksa & Putri, 2023).

Dalam perspektif teori konstruksionisme sosial yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial sejatinya tidak pernah hadir secara objektif di luar kesadaran manusia, melainkan merupakan hasil dialektika simultan melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Darma, 2022). Ketika paradigma konstruksionisme ini ditarik ke dalam studi jurnalistik, berita bukanlah cerminan fakta mentah yang utuh, melainkan produk interpretatif hasil interaksi antara wartawan, rutinitas kerja redaksi, dan serpihan peristiwa di lapangan (Sobur, 2021). Media bertindak sebagai agen konstruksi realitas yang membubuhkan makna subjektif melalui strategi penonjolan aspek tertentu (*salience*) dan peminggiran aspek lainnya agar suatu peristiwa lebih bermakna dan mudah diingat oleh publik (Eriyanto, 2021). Pada praktik jurnalisme di Indonesia, mekanisme pembingkaian ini kerap bertolak belakang dengan fenomena fragmentasi berita, di mana informasi politik dipecah ke dalam potongan artikel pendek demi mengejar kecepatan unggah, yang berimplikasi pada tereduksinya konteks utuh suatu persoalan demokrasi (Fadillah & Rahmawati, 2023).

Salah satu fenomena komunikasi politik paling krusial yang memicu polarisasi diskursus di ruang publik Indonesia adalah bergulirnya wacana pemakzulan (*impeachment*) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wacana tersebut berkembang jauh melampaui perdebatan yuridis formal mengenai syarat-syarat konstitusional pemberhentian wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 (Kusuma & Putri, 2022). Tuntutan pemakzulan yang digulirkan oleh koalisi masyarakat sipil, akademisi hukum tata negara, purnawirawan, serta gelombang percakapan warganet di media sosial berakar pada akumulasi gugatan terhadap integritas moral dan legitimasi proses kepemimpinan nasional. Isu ini mencuat seiring menguatnya kembali polemik putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan, tudingan praktik dinasti politik, hingga kontroversi rekam jejak komunikasi digital di masa lalu yang dipandang publik mencederai etika pejabat publik (Wibowo & Nugroho, 2023). Fenomena

ini menjadikan wacana pemakzulan bukan sekadar peristiwa hukum tata negara, melainkan arena pertarungan narasi mengenai standar kelayakan moral seorang pemimpin negara di ruang media massa (Prasetyo & Wibowo, 2023).

Observasi awal terhadap pemberitaan pada empat portal berita online nasional yakni detik.com, kompas.com, kumparan.com, dan indopolitika.com memperlihatkan adanya divergensi pola pembingkaian yang mencolok dalam merespons bergulirnya wacana pemakzulan tersebut. Sebagai pelopor media berorientasi pada kecepatan dan pasar luas, detik.com cenderung menyajikan perkembangan isu dalam format berita kilat (*running news*) yang menonjolkan bantahan atau respons pragmatis dari elite koalisi pemerintah dan pimpinan parlemen (Santoso & Hidayat, 2023). Di sisi lain, kompas.com yang merepresentasikan jurnalisme arus utama berkarakter moderat dan institusional lebih banyak membingkai isu ini dalam koridor prosedural hukum tata negara dengan menekankan tingginya ambang batas syarat konstitusional pemakzulan (Utami, 2022). Berbeda halnya dengan kedua media arus utama tersebut, kumparan.com memadukan laporan kronologis dengan sorotan terhadap dinamika percakapan publik digital, sementara indopolitika.com tampil dengan leksikon politik yang lebih lugas dan tajam dalam mengangkat suara-suara kritis kelompok oposisi maupun masyarakat sipil (Wahyuni & Anshori, 2022). Perbedaan pilihan narasumber dan penekanan tema pada keempat situs berita ini mengindikasikan bekerjanya ideologi redaksi dalam memaknai krisis legitimasi kekuasaan.

Pemetaan terhadap penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kajian analisis framing pemberitaan politik di media online Indonesia telah berkembang pesat, namun masih menyisakan celah konseptual yang signifikan. Studi-studi mutakhir umumnya berfokus pada pembingkaian citra aktor politik selama kontestasi pemilihan umum, dinamika perombakan kabinet, polarisasi media sosial, serta pengaruh kepemilikan konglomerasi media terhadap keberpihakan pemberitaan partisan (Prastiwi & Irwansyah, 2021). Di sisi lain, kajian komunikasi berbasis kearifan lokal Nusantara juga mulai mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai etika Hindu digunakan untuk mengevaluasi perilaku komunikasi publik, kepemimpinan birokrasi, dan wacana media (I. G. A. Putra & Sudarsana, 2022). Meskipun demikian, mayoritas penelitian framing politik masih berhenti pada identifikasi dikotomis berbasis teori komunikasi Barat seperti bingkai pro versus kontra atau bingkai ekonomi versus hukum tanpa mengintegrasikan kerangka evaluasi etis berbasis filsafat kepemimpinan Nusantara untuk menguji *nilai* moralitas teks berita politik(Sudiarta, 2021).

Analisis etika kepemimpinan dalam studi framing jurnalisme politik merupakan kesenjangan terkait diskursus pemakzulan pada hakikatnya menyentuh akar nilai tentang kelayakan moral seorang pemimpin di mata rakyatnya. Dalam tradisi pemikiran politik dan kebudayaan Nusantara yang berakar pada sastra Hindu, standar moralitas dan laku ideal seorang pemimpin dirumuskan secara komprehensif melalui ajaran *Asta Brata* (Wiana, 2023). Konsep *Asta Brata* yang termuat dalam kitab *Manawa Dharmasastra* dan *Kakawin Ramayana* menggariskan delapan sifat dewa atau unsur kosmik alam semesta yang wajib diinternalisasi oleh seorang penguasa, meliputi *Indra Brata* (memberi kesejahteraan dan pengayoman), *Yama Brata* (menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu), *Surya Brata* (memberi pencerahan dan keteladanan), *Candra Brata* (memancarkan kesejukan dan kesantunan komunikasi), *Bayu Brata* (kepekaan menyelami aspirasi rakyat), *Kuwera Brata* (akuntabilitas pengelolaan kekuasaan), *Baruna Brata* (keluasan wawasan intelektual), serta *Agni Brata* (keberanian moral membela kebenaran) (Wirawan & Astawa, 2024).

Upaya mengoperasionalisasikan evaluasi etika *Asta Brata* ke dalam teks pemberitaan media online secara sistematis, penelitian ini memadukannya dengan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto, 2021). Model Pan dan Kosicki dipilih karena menawarkan perangkat analisis wacana berita yang terstruktur secara mikro hingga makro melalui empat *nilai*, yakni struktur sintaksis (cara wartawan menyusun fakta melalui piramida terbalik, judul, teras berita, dan kutipan), struktur skrip (kelengkapan unsur 5W+1H sebagai alur cerita), struktur tematik (koherensi proposisi dan gagasan utama), serta struktur retoris (pilihan leksikon, idiom, metafora, dan penekanan citra) (Sobur, 2021). Melalui sintesis metodologis ini, struktur tematik dan struktur retoris yang diproduksi oleh wartawan tidak hanya dibaca sebagai strategi bahasa jurnalistik semata, melainkan ditafsirkan secara hermeneutik untuk melihat kebajikan *Asta Brata* mana yang ditonjolkan, dinegosiasikan, atau justru diabaikan oleh institusi media ketika memberitakan isu pemakzulan wakil presiden (Adnyana, 2023).

Integrasi antara teori framing Pan dan Kosicki dengan filosofi etika kepemimpinan *Asta Brata* menghadirkan kebaruan (*novelty*) sekaligus kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu komunikasi politik dan kajian komunikasi Hindu di Indonesia. Secara teoretis, pendekatan ini memperkaya kajian framing dengan menghadirkan perspektif *indigenous communication ethics* yang membumi dalam konteks budaya politik Nusantara, sekaligus menggeser analisis media dari sekadar pemetaan bias partisan menuju evaluasi kualitas moral diskursus publik (Artana, 2026). Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kritis bagi khalayak pembaca dan praktisi

jurnalisme siber mengenai bagaimana media online memediasi ketegangan antara kalkulasi stabilitas politik pragmatis (*artha*) dan tuntutan penegakan kebajikan kepemimpinan (*dharma*) (Suardana, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan teoretis tersebut, penelitian ini mengambil topik Analisis Framing Pemberitaan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dalam Perspektif Etika Kepemimpinan Hindu (*Asta Brata*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi konstruksi teks keempat portal berita online sekaligus menelaah maknanya secara kritis dalam perspektif etika kepemimpinan Hindu (*Asta Brata*).

METODE

Penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif untuk mengungkap konstruksi realitas teks pemberitaan wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka pada empat portal berita online nasional yang dipilih secara purposive berdasarkan perbedaan karakteristik editorial serta segmentasi pembacanya, yakni detik.com, kompas.com, kumparan.com, serta indopolitika.com. Subjek analisis penelitian ini berupa teks artikel berita online (mencakup judul, teras berita/*lead*, tubuh berita, kutipan narasumber, latar informasi, hingga visualisasi) yang memuat diskursus pemakzulan wakil presiden selama periode puncak eskalasi isu pada tahun 2025–2026, dengan sampel sebanyak empat artikel utama dari masing-masing portal sehingga total berjumlah enam belas korpus berita yang diseleksi melalui teknik dokumentasi arsip digital online berdasarkan aktualitas peristiwa, keberagaman narasumber, serta relevansinya dengan *nilai* moralitas kepemimpinan (Yuliani & Rohman, 2022). Instrumen penelitian dilengkapi dengan lembar matriks koding analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mengoperasionalisasikan struktur sintaksis, struktur skrip (5W+1H), struktur tematik, dan struktur retoris serta tabel indikator hermeneutik delapan asas etika kepemimpinan Hindu (*Asta Brata*) sebagai parameter evaluasi moral teks berita (Wiana, 2023). Teknik analisis data dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahap yang meliputi reduksi dan kategorisasi segmen leksikal maupun proposisi berita ke dalam matriks perbandingan empat struktur framing antar-media, interpretasi mendalam (*thick description*) terhadap kecenderungan tematik dan retoris masing-masing portal berita menggunakan kerangka filosofis *Asta Brata*, serta pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber korpus berita, triangulasi teoretis, dan ketekunan pengamatan guna menjamin validitas dan reliabilitas simpulan penelitian (Adnyana, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Struktural Framing Teks Berita (Model Pan & Kosicki)

Hasil analisis tekstual terhadap empat portal media online nasional memperlihatkan fragmentasi wacana yang sangat kontras dalam membingkai polemik pemakzulan (*impeachment*) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setiap portal berita memanfaatkan keempat perangkat struktural framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yakni struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris untuk mengarahkan kesadaran kognitif khalayak pembaca pada sudut pandang tertentu, sebagaimana dipetakan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Struktur Framing Pemberitaan Wacana Pemakzulan pada Empat Media Online

Struktur Framing	*Detik.com*	*Kompas.com*	*Kumparan.com*	*Indopolitika. com*
Sintaksis (Bagan Berita, *Lead*, Sumber)	Piramida terbalik ringkas (5–7 paragraf) dalam format *running news*. *Lead* menonjolkan bantahan cepat elite koalisi pemerintah dan pimpinan parlemen. Kutipan didominasi satu narasumber tunggal per berita.	Piramida terbalik utuh dan berimbang (8–12 paragraf). *Lead* menempatkan polemik dalam koridor konstitusi. Kutipan mempertemukan pakar hukum tata negara dengan pengusul petisi secara berimbang (*cover both sides*).	Naratif-kronologis dengan sub-judul penjelas. Lead menyoroti dinamika percakapan digital dan tuntutan masyarakat sipil. Latar berita mengulas rekam jejak kontroversi pencalonan.	Penjajaran kronologis tajam dan konfrontatif. Headline dan lead langsung mengutip pernyataan tokoh kritis, akademisi, dan koalisi masyarakat sipil sebagai aktor sentral.

Struktur Framing	*Detik.com*	*Kompas.com*	*Kumparan.com*	*Indopolitika. com*
Skrip (Kelengkapan 5W+1H)	Dominan pada unsur *Who* (aktor elite pemerintah) dan *What* (respons penolakan wacana pemakzulan). Unsur *Why* dan *How* konstitusional terpecah ke dalam berita terpisah.	Sangat menonjolkan unsur *How* (mekanisme ketat Pasal 7A dan 7B UUD 1945 melalui DPR, MK, dan MPR) serta What secara komprehensif dan terstruktur.	Memusatkan narasi pada unsur *Why* (akar polemik etika publik dan sorotan rekam jejak digital) dan *When* (eskalasi gelombang petisi warganet).	Menitikberatkan relasi kausalitas unsur *Why* dan *Who* (alasan gugatan moralitas konstitusional dan siapa saja kelompok sipil yang menggulirkan desakan).
Tematik (Koherensi Proposisi)	Tema stabilitas politik dan normalitas birokrasi. Wacana pemakzulan diposisikan sebagai dinamika politik biasa yang tidak memengaruhi kinerja pemerintahan.	Tema proseduralisme hukum tata negara. Wacana pemakzulan dibingkai sebagai gagasan politik yang sulit terealisasi karena tingginya ambang batas syarat konstitusional.	Tema transparansi dan akuntabilitas figur publik. Pemakzulan dibingkai sebagai manifestasi pengawasan kritis warga negara di era keterbukaan digital.	Tema krisis etika kepemimpinan dan delegitimasi moral. Menyoroti akumulasi cacat prosedural sejak pencalonan serta tuntutan pertanggungjawab an etis penguasa.
Retoris (Leksikon, Idiom, Visual)	Leksikon pragmatis dan meredam tensi manuver politik, isu liar, tidak relevan, fokus bekerja. Visualisasi foto aktivitas kerja lapangan yang santai.	Leksikon formal legalistik: mekanisme konstitusional, syarat formil, stabilitas nasional, ambang batas hukum. Visualisasi foto gedung parlemen atau rapat resmi.	Leksikon deskriptif reflektif: sorotan publik, rekam jejak digital, polemik etik, ujian legitimasi. Visualisasi infografis kronologi isu.	Leksikon tajam, skeptis, dan evaluatif: cacat etik, desakan pemakzulan, akuntabilitas moral, krisis integritas. Visualisasi foto pose serius dan pernyataan tegas tokoh kritis.

Secara sintaksis, keempat portal media online memperlihatkan strategi penataan fakta yang sangat berbeda untuk mengonstruksi signifikansi peristiwa di mata pembaca (Sudiartawan &

Arjana, 2025). Detik.com memilih format piramida terbalik ringkas yang mengedepankan aspek stabilitas operasional pemerintahan, di mana pernyataan bantahan elite koalisi diposisikan sebagai premis utama yang segera menutup ruang perdebatan. Penataan teras berita (*lead*) pada Detik.com secara konsisten mengutip respons tokoh parlemen atau pejabat istana yang menyatakan bahwa isu pemakzulan tidak memiliki urgensi politik. Strategi sintaksis ini menciptakan efek penenangan wacana (*depoliticization*), menggiring publik untuk memandang tuntutan pemakzulan sekadar riak politik harian yang tidak perlu ditanggapi secara serius (Santoso & Hidayat, 2023). Sebaliknya, Indopolitika.com merancang struktur sintaksis dengan strategi penonjolan aktor kritis (*foregrounding of dissent*). Tajuk utama dan teras berita Indopolitika.com secara gamblang menempatkan suara koalisi masyarakat sipil, purnawirawan, dan akademisi hukum tata negara pada posisi hierarki tertinggi teks, sementara bantahan pihak istana ditempatkan sebagai pelengkap di bagian akhir. Penataan sintaksis semacam ini secara kognitif membimbing pembaca untuk memandang wacana pemakzulan sebagai gerakan moral yang sah dan mendesak (Fadillah & Rahmawati, 2023).

Pada aspek struktur skrip, penerapan formula 5W+1H memperlihatkan segmentasi kedalaman peliputan berita yang mencolok di antara media Indonesia (Prastiwi & Irwansyah, 2021). Detik.com memberikan bobot utama pada unsur *Who* (siapa pejabat yang merespons) dan *What* (apa bantahan yang disampaikan), sementara unsur *Why* (mengapa tuntutan pemakzulan muncul) sering kali direduksi demi mengejar kecepatan unggah (*real-time update*). Fenomena ini sejalan dengan temuan Putra & Sari (2023) bahwa jurnalisme kerap menerapkan prinsip keberimbangan secara terpecah ke dalam artikel berseri. Berbeda dengan itu, Kompas.com mengunci struktur skripnya pada elaborasi mendalam unsur How yakni bagaimana rumitnya mekanisme yuridis pemberhentian wakil presiden berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang menuntut pembuktian tindak pidana berat di Mahkamah Konstitusi serta forum politik di MPR. Kontras dengan kedua media arus utama tersebut, Kumparan.com dan Indopolitika.com menempatkan unsur *Why* sebagai narasi. Kumparan.com menguraikan *nilai Why* secara kronologis dengan menautkan polemik saat ini pada kontroversi putusan batas usia pencalonan serta sorotan warganet atas rekam jejak komunikasi digital figur di masa lalu, sedangkan Indopolitika.com mengeksplorasi unsur *Why* sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap standar etika penyelenggaraan negara (Kusuma & Putri, 2022).

Ditinjau dari struktur tematik dan struktur retoris, koherensi logis antar proposisi kalimat serta pemilihan leksikon menghasilkan dua kutub pemaknaan yang saling bertolak belakang (Darma, 2022). Detik.com dan Kompas.com menyusun proposisi teks yang bermuara pada tema stabilitas konstitusional dan kontinuitas pembangunan nasional dengan memanfaatkan diksi pragmatis legalistik seperti manuver, syarat formil, mekanisme konstitusional, dan fokus bekerja. Rangkaian retorika ini, yang diperkuat visualisasi foto aktivitas kerja lapangan maupun gedung parlemen yang tertib, memposisikan wacana pemakzulan sebagai gangguan terhadap konsolidasi pemerintahan baru (Prasetyo & Wibowo, 2023). Di sisi lain, Kumparan.com dan Indopolitika.com membangun struktur tematik di seputar tema akuntabilitas moral dan pengawasan publik terhadap kekuasaan melalui pilihan diksi evaluatif yang tajam seperti cacat etik, desakan pemakzulan, akuntabilitas moral, dan krisis integritas. Pilihan retoris tersebut menegaskan posisi kedua portal ini sebagai ruang artikulasi wacana tandingan (*counter framing*) yang menolak simplifikasi narasi stabilitas prosedural (Nugroho & Syarif, 2022).

Refleksi Etika Kepemimpinan Hindu (*Asta Brata*) dalam Pembingkaian Media Online

Analisis tekstual melalui model Pan dan Kosicki di atas membuktikan bahwa berita politik tidak pernah berada di ruang hampa nilai. Ketika diskursus media tersebut dibedah melalui kacamata filsafat etika kepemimpinan Hindu (*Asta Brata*) sebagaimana termuat dalam kitab *Manawa Dharmasastra* dan *Kakawin Ramayana* tersingkap pertarungan standar moralitas kepemimpinan yang mendalam. *Asta Brata* menggariskan delapan kebajikan kosmik alam semesta yang wajib diwujudkan oleh seorang pemimpin (*raja niti*), meliputi *Indra Brata, Yama Brata, Surya Brata, Candra Brata, Bayu Brata, Kuwera Brata, Baruna Brata*, dan *Agni Brata* (Wiana, 2023). Pembingkaian keempat portal media online terhadap wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka merefleksikan terjadinya negosiasi dan disonansi atas pilar-pilar utama *Asta Brata* berikut:

Pada nilai *Yama Brata* (Ketegasan Keadilan dan Supremasi Hukum). Dalam ajaran etika kepemimpinan Hindu, *Yama Brata* menuntut pemimpin meneladani sifat *Dewa Yama* dalam menegakkan hukum dan keadilan secara tegas, objektif, dan tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran (Suardana, 2022). Dalam pemberitaan Kompas.com, prinsip *Yama Brata* direduksi dan dimaknai dalam kerangka positivisme hukum prosedural (*legal formalism*). Keadilan dan legitimasi pemimpin diukur semata-mata dari terpenuhi atau tidaknya delik pidana berat sebagaimana tertuang secara tekstual dalam Pasal 7A UUD 1945. Melalui pembingkaian ini,

Kompas.com memposisikan ketatnya prosedur formal sebagai benteng pertahanan kekuasaan. Sebaliknya, pembingkaian teks pada Indopolitika.com menafsirkan *Yama Brata* dalam nilai keadilan etis yang jauh lebih substantif. Upaya menonjolkan argumen para pakar hukum tata negara kritis dan masyarakat sipil, Indopolitika.com menegaskan bahwa hukum tertinggi dalam kepemimpinan adalah kemurnian proses konstitusional dan kejujuran moral, bukan sekadar kelolosan dari jerat prosedural formal(Wardana, 2021).

Nilai *Baruna Brata* dan *Candra Brata* (Keluasan Wawasan Kenegaraan dan Kesantunan Komunikasi Publik). Pilar *Baruna Brata* mengibaratkan seorang pemimpin laksana samudra luas yang memiliki kedalaman wawasan intelektual, kematangan kenegaraan, serta keluasan hati dalam menampung berbagai kritik rakyat (Wiana, 2023). Sementara itu, *Candra Brata* menuntut pemimpin memancarkan kesejukan bulan melalui kelembutan tutur kata, kesantunan budi pekerti, dan keteladanan komunikasi yang menenteramkan hati masyarakat (I. G. A. Putra & Sudarsana, 2022). Hasil analisis teks memperlihatkan bahwa kedua *nilai* inilah yang menjadi sorotan tajam dalam pemberitaan Kumparan.com dan Indopolitika.com. Ketika kedua portal tersebut mengulas latar belakang tuntutan pemakzulan dengan menyoroti kontroversi rekam jejak komunikasi digital di masa lalu serta keraguan publik terhadap kematangan pengalaman kenegaraan figur wakil presiden muda, teks berita sesungguhnya sedang merefleksikan kegelisahan ruang publik atas defisit laku *Candra Brata* dan *Baruna Brata*. Retorika digital masa lalu yang dinilai publik jauh dari kesantunan serta minimnya artikulasi gagasan kenegaraan yang mendalam dibingkai sebagai bentuk ketidakselarasan perilaku figur pemimpin dengan standar kebajikan (Astawa, 2021).

Nilai *Indra Brata*, *Bayu Brata*, dan *Agni Brata* (Pengayoman Rakyat, Kepekaan Aspirasi, dan Keberanian Moral). Pertarungan narasi antara Detik.com dan Indopolitika.com merepresentasikan ketegangan langsung antara prinsip *Indra Brata* dan *Bayu Brata*. *Indra Brata* meneladani Dewa Indra yang menurunkan hujan kemakmuran untuk mengayomi kesejahteraan rakyat (Suhardana, 2021). Detik.com mengartikulasikan nilai *Indra Brata* dalam bingkai pragmatisme pembangunan, di mana keberlanjutan program kerja pemerintah dinarasikan sebagai wujud pengayoman tertinggi bagi kesejahteraan rakyat yang tidak boleh diganggu oleh kegaduhan politik (Santoso & Hidayat, 2023). Sebaliknya, Indopolitika.com dan Kumparan.com mengaktualisasikan prinsip *Bayu Brata* kewajiban pemimpin bergerak laksana angin yang menyusup ke seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat untuk mendengar kegelisahan rakyat akar rumput dengan memberikan wadah bagi organisasi masyarakat sipil (Adnyana, 2023). Lebih jauh,

tuntutan agar pejabat negara memberikan klarifikasi terbuka dan mempertanggungjawabkan rekam jejaknya di hadapan publik mencerminkan kerinduan akan laku *Agni Brata*, yakni keberanian moral seorang pemimpin untuk menghadapi evaluasi kebenaran secara kesatria (Ginaya, Astuti, & Mataram, 2022).

Faktor Ideologis dan Relasi Kuasa dalam Wacana Pemakzulan Wakil Presiden RI

Divergensi pembingkaian yang ditemukan pada keempat portal berita online tidak berlangsung di ruang jurnalistik, melainkan ditentukan oleh bekerjanya faktor ideologis dan relasi kuasa di balik institusi media massa. Dalam kerangka teori konstruksionisme sosial Berger dan Luckmann (Darma, 2022) serta pendekatan ekonomi politik media kritis di Indonesia (Kurniawan & Astuti, 2021), teks berita merupakan artikulasi dari struktur kepemilikan modal, jaringan kepentingan oligarki, serta posisi ideologis ruang redaksi terhadap rezim kekuasaan yang sedang berjalan. Institusi media online di Indonesia beroperasi dalam lanskap industri informasi yang terkonsentrasi, di mana keberlangsungan bisnis media bertautan erat dengan stabilitas makroekonomi, belanja iklan institusi negara, serta akses informasi eksklusif ke lingkaran elite pemerintahan (Nugroho & Syarif, 2022).

Pada media arus utama berskala korporasi besar seperti Detik.com dan Kompas.com, faktor ideologis yang bekerja adalah ideologi stabilitas dan institusionalisme moderat. Kedua media ini memiliki kepentingan struktural untuk menjaga harmoni relasi dengan pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi agar akses informasi birokrasi serta ekosistem bisnis media tetap terjaga (Wibowo & Nugroho, 2023). Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan isu sensitif seperti wacana pemakzulan wakil presiden yang berpotensi mengguncang stabilitas koalisi pemerintahan, kebijakan redaksionalnya cenderung memproduksi bingkai yang meredam krisis (*containment framing*). Upaya menempatkan pernyataan pejabat pemerintah dan tafsir hukum formal yang ketat sebagai wacana dominan, media arus utama secara tidak langsung berperan mereproduksi hegemoni kekuasaan yang sah dan meminggirkan tuntutan kelompok kritis sebagai sekadar riak pinggiran(Satyadinata & Yasa, 2026).

Sebaliknya, pada portal berita digital seperti Kumparan.com dan khususnya Indopolitika.com, bekerja ideologi pengawasan kritis (*watchdog journalism*) dan logika ekonomi atensi publik digital. Karena tidak terikat secara langsung pada struktur konglomerasi bisnis konvensional yang bergantung pada konsesi negara, portal berita spesialis politik menemukan ruang gerak ideologis sekaligus insentif ekonomi dengan mengambil posisi berjarak dari

kekuasaan (Nasrullah, 2022). Di era ruang publik digital, di mana arus percakapan warganet (netizen) turut mempengaruhi agenda pemberitaan media online (Putra & Sari, 2023), Indopolitika.com dan Kumparan.com memanfaatkan gelombang sentimen kritis publik sebagai energi wacana untuk menantang narasi resmi pemerintah. Melalui hal tersebut, pertarungan wacana pemakzulan di keempat media online pada hakikatnya merefleksikan dialektika klasik antara *Artha* (kalkulasi stabilitas kekuasaan dan kepentingan industri media) dengan *Dharma* (tuntutan akuntabilitas moral dan kebajikan kepemimpinan *Asta Brata*), di mana media massa menjadi arena kontestasi legitimasi antara kekuasaan formal dan suara kritis masyarakat sipil (Suardana, 2022).

SIMPULAN

Pemberitaan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada empat portal media online nasional memperlihatkan konstruksi realitas yang terpolarisasi secara struktural maupun ideologis, di mana detik.com dan kompas.com membingkai isu tersebut dalam koridor stabilitas pemerintahan dan ketatnya prosedur hukum tata negara melalui *skema running news* maupun liputan legalistik berimbang, sedangkan kumparan.com dan indopolitika.com membingkainya secara kritis sebagai ruang akuntabilitas etik dan pengawasan moral masyarakat sipil dengan menonjolkan akar polemik rekam jejak kepemimpinan. Ditinjau dalam perspektif etika kepemimpinan Hindu (*Asta Brata*), perbedaan bingkai keempat media tersebut merefleksikan ketegangan normatif antara pemaknaan hukum prosedural (*Yama Brata*) dan stabilitas pembangunan pragmatis (*Indra Brata*) di satu sisi, dengan tuntutan kesantunan komunikasi publik (*Candra Brata*), keluasan wawasan kenegaraan (*Baruna Brata*), serta kepekaan mendengar aspirasi rakyat (*Bayu Brata*) di sisi lain, yang seluruhnya digerakkan oleh relasi kuasa serta logika ekonomi politik masing-masing institusi media. Secara epistemologis, kajian ini memberikan kontribusi orisinal bagi pengembangan ilmu komunikasi politik di Indonesia dengan membuktikan bahwa penggabungan model analisis framing struktural Pan dan Kosicki bersama filsafat etika kepemimpinan Nusantara *Asta Brata* mampu membongkar bias normatif jurnalisme digital kontemporer secara lebih holistik dan berakar pada nilai keluhuran budi pekerti bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, I. W. (2023) "Kepemimpinan transformatif berbasis ajaran Tri Kaya Parisudha dan

Asta Brata dalam era disrupsi.", Jurnal Widya Wacana, 18(1), 45–56.
Artana, N. Y. (2026) "Konstruksi Agenda Karhutla Di Media Massa: Refleksi Keharmonisan Relasional Dalam Bingkai Tri Hita Karana", Sadhananikarana, 8(2), 152–166. DOI:https://doi.org/10.53977/sadharananikarana.v8i2.4471
Astawa, I. N. T. (2021) "Etika komunikasi politik dalam perspektif Hindu: Menakar wacana publik di era digital", Jurnal Widya Sains, 3(2), 78–89.
Darma, Y. A. (2022) *Analisis wacana kritis: Teori, model, dan aplikasinya dalam studi media*. Bandung: Refika Aditama.
Eriyanto (2021) *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media* (Cet. ke-8). Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
Fadillah, R., Rahmawati, A. (2023) "Dramatisasi berita politik di media online Indonesia: Analisis semiotika dan framing", Jurnal Komunikasi Massa, 16(2), 112–128.
Ginaya, G., Astuti, N. N. S., Mataram, I. G. A. B. (2022) "Implementasi etika Hindu dalam tata kelola kelembagaan dan kepemimpinan publik", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 6(1), 55–67.
Kurniawan, B., Astuti, S. I. (2021) "Ekonomi politik media online di Indonesia: Konvergensi dan komodifikasi berita", Jurnal ASPIKOM, 6(2), 310–324.
Kusuma, R. S., Putri, D. A. (2022) "Komunikasi politik kabinet dan elite negara di era digital: Ketegangan antara konstitusi dan opini publik", Jurnal Penelitian Politik, 19(2), 145–160.
Nasrullah, R. (2022) *Jurnalisme siber: Konstruksi berita di era digital dan media sosial*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
Nugroho, Y., Syarif, A. (2022) "Konsentrasi media, oligarki, dan diskursus publik dalam lanskap digital Indonesia", Jurnal Komunikasi Indonesia, 11(1), 45–62.
Prasetyo, A., Wibowo, H. (2023) "Konstruksi stabilitas politik dan sentimen pasar dalam pemberitaan media daring nasional", Jurnal Kajian Komunikasi, 11(1), 89–104.
Prastiwi, F., Irwansyah, I. (2021) "Analisis framing pemberitaan dinamika politik pemerintahan di media siber Indonesia", Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 6(1), 89–102.
Pratyaksa, I. G. T., Putri, N. L. W. E. (2023) "Analisis Framing Kebijakan Gubernur Bali Dalam Pembatalan Drawing Piala Dunia U-20", Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relation, 2(1), 62–73. DOI:https://doi.org/10.53977/jsv.v2i1.986
Putra, I. G. A., Sudarsana, I. K. (2022) "Etika komunikasi Hindu dalam membangun harmoni sosial dan ruang publik yang beradab", Jurnal Dharmasmrti, 22(1), 34–46.
Putra, R. M., Sari, N. P. (2023) "Fragmentasi berita dan praktik running news pada portal berita daring nasional", Jurnal Jurnalistik Indonesia, 8(2), 101–116.
Santoso, B., Hidayat, M. (2023) "Konstruksi media arus utama terhadap legitimasi kebijakan dan stabilitas birokrasi pemerintahan", Jurnal Wacana Politik, 8(2), 178–192.
Satyadinata, N. D., Yasa, I. K. W. P. (2026) "Analisis Framing Pemberitaan Pencopotan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa Dalam Kajian Tri Kaya Parisudha", Sadhananikarana, 8(2), 135–151. DOI:https://doi.org/10.53977/sadharananikarana.v8i2.4469
Sobur, A. (2021) *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, semiotik, dan framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Suardana, I. W. (2022) "Relevansi ajaran kepemimpinan Asta Brata dalam etika politik dan pemerintahan kontemporer", Jurnal Dharma Duta: Jurnal Penerangan Agama Hindu, 20(1), 45–58.
Sudiarta, I. W. (2021) "Epistemologi komunikasi Hindu: Refleksi filosofis atas teks dan wacana

publik.", Jurnal Beda, 10(1), 22–35.
Sudiartawan, I. W., Arjana, I. B. M. (2025) "Konstruksi Realitas Multiportal: Agenda Setting dan Framing Humas Pemerintah Dalam Distribusi Informasi di Era Media Digital", Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relation, 4(2), 15–28. DOI:https://doi.org/10.53977/jsv.v4i2.3302
Suhardana, K. (2021) *Asta Brata: Kepemimpinan Hindu dalam perspektif modern*. Bali: Paramita.
Utami, P. (2022) "Konstruksi wacana media siber terhadap dinamika kekuasaan eksekutif di Indonesia", Jurnal Studi Komunikasi, 6(3), 741–758.
Wahyuni, S., Anshori, M. (2022) "Analisis pembingkaian media terhadap kontroversi politik di portal berita nasional", Jurnal Komunika, 16(1), 67–82.
Wardana, I. M. (2021) *Filsafat komunikasi dan etika kekuasaan di Nusantara*. Bali: Pustaka Bali Post.
Wiana, I. K. (2023) *Kepemimpinan Hindu berdasarkan Niti Sastra dan Asta Brata*. Bali: Yayasan Dharma Naradha.
Wibowo, A., Nugroho, Y. (2023) "Polarisasi pemberitaan politik pada portal berita daring di Indonesia pasca-pemilu", Jurnal Ilmu Komunikasi, 21(2), 134–150.
Wirawan, I. K. A., Astawa, I. N. (2024) "Implementasi nilai-nilai Asta Brata dalam komunikasi kepemimpinan publik di era digital.", Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relation, 3(1), 12–25.